



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WINDAYANI ZAKARIA SAPAN
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 195407

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.260.400.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/96 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/20 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 560.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 311.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOBIL, HONDA HR-V RV1 1.5 E CVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOTOR, HONDA ACF1L21B06 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 70.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 622.568.697

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.263.968.697

III. HUTANG Rp. 33.612.122

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.230.356.575

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EFY SYAHRANI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 208877

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** 365.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/99 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** 125.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SX4 S CROSS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** 35.000.000

D. SURAT BERHARGA **Rp.** ----

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** 357.656.029

F. HARTA LAINNYA **Rp.** 60.000.000

Sub Total **Rp.** 942.656.029

III. HUTANG **Rp.** ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** 942.656.029

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDI ASMAH SARI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 210419

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.420.000.000

1. Tanah Seluas 1061 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/120 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 497.500.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, HYUNDAI MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. LAINNYA, PASIFIK L543 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, HYUNDAI MINIBUS Tahun 0000, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 54.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 63.976.123

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.035.976.123

III. HUTANG Rp. 187.468.998

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.848.507.125



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD RIZKI ALAMSYAH
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 417020

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	220.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/56 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	10.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	37.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	29.897.616
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	297.197.616
III. HUTANG	Rp.	194.782.118
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	102.415.498

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YERISLIN WUALA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 424593

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	115.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/36 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	51.819.483
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	183.819.483
III. HUTANG	Rp.	85.553.833
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	98.265.650

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDI MUH. REZA ASHARI W
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 426246

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	250.000.000
1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 50.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/90 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	15.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	281.100.000
III. HUTANG	Rp.	32.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	248.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I KETUT RIAWAN BUDIARTA
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 426255

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 487.000.000**

1. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 32.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/36 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 162.000.000
3. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 40.500.000
4. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 41.000.000
5. Tanah Seluas 2450 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 36.000.000
6. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 46.500.000
7. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 40.500.000
8. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 42.500.000
9. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 46.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 123.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2014, HADIAH Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	10.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.443.403
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	622.943.403
III. HUTANG	Rp.	320.669.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	302.274.403

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAUZY DAENG PAREBBA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NIK : 897273

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 310.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/78 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 21.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BKU A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.650.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.233.995

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 411.883.995

III. HUTANG Rp. 225.048.110

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 186.835.885

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.